

**Analysis Of Human Resources In Elementary School Using The Stages Of  
Patton Analysis**

**Djamal Said Askar**

djamalaskar@gmail.com

UIN Raden Mas Said Surakarta

**Muhammad Nasri Dini**

elnasri.ahmad@gmail.com

UIN Raden Mas Said Surakarta

**Isnaeni Sofiana**

isnainisofiana6@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Received: December 10, 2021/ Accepted: January 15, 2022**

**Abstract**

Policy analysis is a scientific discipline that uses rational argumentation by using existing data to assess, explain and generate ideas in order to solve a problem. This research will analyze education policy related to human resource management in elementary schools. This research was conducted at SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo. The research method used is qualitative. The subject of this research is the principal of SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Data collection in this study used interview, observation, and documentation techniques. The data obtained were then analyzed by data reduction techniques, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that there are HR problems at SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, where there are still many teachers who have not graduated from S1. Among the policy solutions offered are: tightening the teacher recruitment process and requiring teachers to attend undergraduate courses.

**Keywords:** *Analysis, Human Resources, Elementary School*

## A. Pendahuluan

Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan dan kualitas pendidikan untuk dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, berbagai macam komponen dari sistem pendidikan nasional harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi maupun kebutuhan yang ada, baik pada skala lokal, nasional apalagi pada skala global. Karena pendidikan merupakan tolak ukur sebuah negara atau bangsa yang maju. Pendidikan juga menjadi hal yang sangat vital terkait keberlangsungan sebuah negara dalam menyelesaikan berbagai problem kenegaraan baik di bidang ekonomi, budaya, kesehatan, agama, dsb.<sup>1</sup>

Dalam era global ini keunggulan suatu bangsa tidak dapat lagi mengandalkan pada sumber daya alam semata, melainkan harus pada sumber daya manusia. Bahkan kualitas SDM bisa dikatakan menempati kedudukan lebih penting dibandingkan dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan organisasi, dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kehidupan dalam masyarakat secara keseluruhan pun akan meningkat pula, meskipun diterjang dengan berbagai perubahan dan persaingan di dalamnya.

Dalam Islam pendidikan merupakan salah satu pokok utama dalam kelanjutan ketauhidan dan keimanan terhadap ajarannya. Bahkan perkembangan pendidikan Islam itu sesungguhnya sejalan dengan berkembang Islam itu sendiri. Karena pendidikan Islam ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman nabi-nabi terdahulu dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah. Dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri menyuratkan dengan sangat jelas tentang perintah untuk membaca. Hal ini sebagaimana terdapat pada bunyi ayat pertama Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bilateral proses

---

<sup>1</sup> Suhelayanti, "Analisis Kebijakan Pendidikan," *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2019): 11–26.

transformasi ilmu pengetahuan ini juga telah terjadi setelah terjadinya perang Badar, di antaranya yaitu dengan meminta para tawanan perang dari pihak musuh untuk melakukan pengajaran membaca dan menulis kepada umat Islam sebanyak sepuluh orang.<sup>2</sup>

Pendidikan Islam pada awal perkembangannya telah memiliki keunggulan karena coraknya yang tersendiri yaitu bersifat komprehensif dengan maksud agar anak didik didorong sehingga mampu untuk menuangkan segala kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dalam pendidikan Islam juga mencakup dua aspek, yaitu meliputi tujuan keagamaan dan tujuan keduniaan. Untuk tujuan-tujuan keduniaan kebijakan baru juga telah diupayakan yaitu dengan cara menonjolkan keterampilan bekerja, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.<sup>3</sup> Kedua tujuan pendidikan tersebut hanya bisa tercapai apabila sistem pendidikan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan sebanding.

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas untuk melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam konteks sistem, seorang pendidik bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pendidikan nasional tersebut. Maka mau tidak mau seorang pendidik dituntut harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu tuntutan bagi sebuah lembaga pendidikan adalah untuk selalu dapat meningkatkan kualitasnya. Hal ini tidak lain agar lembaga pendidikan dapat secara optimal dan maksimal dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Jika lembaga pendidikan tersebut kurang baik dalam hal kualitasnya maka dipastikan lembaga pendidikan tersebut akan semakin ditinggalkan oleh

---

<sup>2</sup> Lina Mayasari Siregar, "Upaya Pendidikan Islam Pada Masa Awal Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 1 (2017): 104–114.

<sup>3</sup> Muh. Hasyim Rosyidi, "Analisis Kebijakan Pendidikan Perspektif Islam Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah," *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 1–11.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

masyarakat. Apalagi di era batas-batas antar negara semakin berkurang pada dunia globalisasi seperti saat ini, banyak masyarakat yang pada akhirnya lebih memilih lembaga pendidikan yang berkualitas meskipun harus berada di luar negeri dibanding dengan lembaga pendidikan yang berada di dalam negeri tetapi kurang berkualitas. Sehingga tidak bisa tidak, agar tetap dipercaya dan dipilih masyarakat semua lembaga pendidikan harus dapat semakin meningkatkan kualitasnya.<sup>5</sup>

Untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain dilaksanakan dengan melakukan pembaruan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekarang masih dianggap cukup mempengaruhi pendidikan adalah keberadaan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mutu tinggi yang dimiliki oleh seorang pendidik diharapkan dapat menjadikannya melakukan tugas mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Dan dari lulusan yang bermutu pada akhirnya juga akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.<sup>6</sup> Lembaga pendidikan Islam wajib agar mengambil perannya masing-masing, kecuali menyiapkan siswanya agar mempunyai bekal untuk dapat menghadapi tantangan dunia globalisasi, lembaga pendidikan Islam juga harus dapat mengelola sumber daya manusianya agar dapat maksimal dalam mencapai tujuan. Lembaga pendidikan Islam harus bisa melahirkan iklim yang kondusif untuk meraih prestasi, sehingga setiap pribadi yang berada dalam lembaga tersebut, baik siswa maupun gurunya senantiasa dapat berusaha untuk membuat kemajuan bagi diri sendiri khususnya maupun lembaga pada umumnya.<sup>7</sup>

Faktanya, hingga sekarang masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan tugasnya sebagai guru. Seperti CNN Indonesia pada 17 September 2021 yang pernah memberitakan bahwa hingga saat ini menurut

---

<sup>5</sup> Walid Fajar Antariksa, "Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sekolah Dasar Islam," *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 10, no. 1 (2020): 47–55.

<sup>6</sup> Ida Kintamani and Dewi Hermawan, "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 404–418.

<sup>7</sup> Fantika Vera Entrisnasari, Fantika Febry Puspitasari, and Supriyanto Supriyanto, "Implementasi Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Al-Qur'an," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no. 2 (2020): 210–225.

catatan Kementerian Agama (Kemenag) ada sekitar 52 ribu guru yang mengajar di madrasah belum memenuhi kualifikasi lulusan sarjana atau strata 1 (S-1). Guru-guru tersebut menurut Kemenag pada umumnya diangkat oleh madrasah swasta dan berstatus sebagai guru honorer. Saat ini, hal itu tengah menjadi perhatian Kemenag. Jumlah guru honorer yang mengajar pada madrasah sekarang ini mencapai sekitar 646 ribu atau 84 persen lebih. Sedangkan, yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) hanya sekitar 16-17 persen guru madrasah saja.<sup>8</sup>

Tidak hanya di lingkungan Kemenag, Republika Online memberitakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus didorong oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pendidikan bagi guru honorer K2 (THK-2). Hal ini karena berdasarkan data yang ada ternyata masih banyak terdapat guru THK-II yang berpendidikan di bawah S-1, yakni D-3, D-2, bahkan SLTA.<sup>9</sup> Muhammad Saidy dalam penelitiannya mengemukakan bahwa salah satu problematika yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya Islam saat ini adalah belum memadainya kualitas dan kuantitas guru. Padahal guru merupakan salah satu kunci terpenting berhasilnya proses pendidikan. Jika gurunya saja mempunyai kualitas yang rendah dan tidak seimbang dengan rasio siswa, maka bisa dipastikan dengan sendirinya akan rendah pula output pendidikannya.<sup>10</sup>

Karenanya peneliti hendak mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah dasar utamanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo. Sebuah sekolah dasar yang

---

<sup>8</sup> CNN, "Kemenag: 52 Ribu Guru Madrasah Belum Lulus S1,"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917200847-20-695992/kemenag-52-ribu-guru-madrasah-belum-lulus-s1>.

<sup>9</sup> Republika, "Banyak Guru Honorer K2 Belum S1 Ini Langkah Pemerintah,"

<https://www.republika.co.id/berita/qzryda485/banyak-guru-honorer-k2-belum-s1-ini-langkah-pemerintah>.

<sup>10</sup> Muhammad Saidy, "Utilizing of Islamic Educational Technology Strategy in Fullfilment Standards of Islamic Education," *EDUCAN: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 190–200.

pengelolaannya berada di bawah naungan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di sekolah tersebut karena berdasarkan observasi awal diketahui bahwa meskipun sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah Islam rujukan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, namun masih didapati di sekolah tersebut banyak pendidik yang belum berijazah sarjana (S-1).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penyusunan artikel ini di antara alasannya adalah karena pemahaman yang mendalam terhadap sebuah permasalahan di dalam jenis penelitian kualitatif lebih ditekankan daripada mengamati masalah untuk penelitian generalisasi.<sup>11</sup> Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo. Narasumber penelitian ini adalah kepala sekolah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Pemeriksaan validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Yaitu teknik yang mengacu pada Moleong yang memberi pengertian bahwa teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pembandingan atau pengecekan terhadap data tersebut. Tujuan digunakannya teknik triangulasi ini adalah dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain untuk mengecek kebenaran data tertentu.<sup>12</sup>

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) ala Milles Huberman. Model analisis diskriptif interaktif adalah model analisis dimana antara ketiga

---

<sup>11</sup> Dr. Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yogyakarta. Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2006).

komponennya (*data reduction, data display, conclusion drawing*) memiliki aktivitas berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus.<sup>13</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo adalah sekolah Islam yang dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Blimbing Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini terletak di kompleks pendidikan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, MTs, SMA dan SMK. Saat ini SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo mempunyai siswa sebanyak 323 siswa, yang terdiri dari 167 siswa laki laki dan 156 siswa perempuan yang terbagi dalam 12 rombongan belajar. Sedangkan guru yang dimiliki oleh sekolah ini adalah 29 orang. Gambaran data guru selengkapnya dapat dibaca dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Kualifikasi Guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>% total guru</b>
S-1	16	55.17
D1	1	3.45
SMA sederajat	12	41.38
	29	

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 29 guru dan karyawan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, 16 di antaranya sudah menyandang gelar sarjana, 12 di antaranya lulusan SMA atau yang sederajat, dan sisanya lulusan D1.<sup>14</sup> Di sini penulis akan melakukan analisis sumber daya manusia di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo menggunakan tahapan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Patton.

#### **Tahap 1: Memverifikasi, Mendefinisikan, dan Merinci Masalah**

<sup>13</sup> Mathew B and Huberman A Michael. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Jakarta. UI Press, 1992).

<sup>14</sup> *Daftar Guru Dan Karyawan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Tahun 2020/2021* (Sukoharjo: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, 2020).

Dalam membuat definisi masalah, seorang analis harus berhati-hati. Pertama memang seorang analis perlu melihat dari banyak sudut pandang dan berkonsultasi dengan banyak orang pula untuk memperhatikan dengan baik permasalahan yang akan dianalisis. Seorang analis tidak boleh langsung menerima definisi masalah secara mentah-mentah karena bisa jadi masalah yang diungkapkan barulah pada tingkat puncak gunung es, yang sebenarnya permasalahan lain di bawahnya masih sangat besar. Namun seorang analis juga perlu dapat menentukan pendefinisian masalahnya dengan berpikir induktif, dengan menganalisis secara optimal data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, lalu tentukan kriteria evaluasinya, memikirkan kemungkinan alternatif, dan kemudian mendefinisikan kembali masalahnya sehingga dapat dikurangi, dikendalikan, mungkin diselesaikan, dengan informasi dan sumber daya yang ada.<sup>15</sup>

Permasalahan yang terlihat dari sumber daya manusia di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo di antaranya adalah terkait dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh guru di sekolah tersebut. Jika standar mutu ini tidak tercapai risikonya adalah kedalaman substansi materi pelajaran tidak tercapai. Dari tabel 1 yang sudah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo yang sudah S-1 baru 16 orang (55.17%). Dari 16 orang ini pun tidak semuanya lulusan S-1 PGSD/PGMI atau psikologi. Secara lengkap jurusan S-1 guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Jurusan S-1 Guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo**

Jurusan S-1	Jumlah	% jumlah guru S-1	% jumlah guru
PAI	4	25	13,79
PGSD	4	25	13,79

<sup>15</sup> Patton, Sawicki, and Clark, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*.



Pend. Bhs. Inggris	1	6,25	3,45
Pend. Bhs. Indonesia	3	18,75	10,34
Komputer	2	12,5	6,90
Pend. Matematika	1	6,25	3,45
Pend. Akuntansi	1	6,25	3,45
	16		

Dari tabel di atas diketahui bahwa jurusan S-1 terbanyak adalah PAI dan PGSD, 25 % dari jumlah guru yang sudah lulus S-1 dan 13.79% dari jumlah total guru secara keseluruhan. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika dan Pendidikan Akuntansi, 6.25% dari jumlah guru S-1 dan 3.45% dari jumlah keseluruhan total guru.

Banyaknya guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo yang belum sesuai kualifikasi akademik ini jika digali lebih lanjut adalah bermula dari proses rekrutmen SDM di sekolah tersebut. Informasi yang didapatkan dari kepala sekolah, proses rekrutmen SDM di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo setidaknya dibagi menjadi 3 cara:

a. Seleksi kader persyarikatan

Sejak awal berdirinya SD Muhammadiyah Imam Syuhodo pada tahun 2011 dan mulai menerima siswa baru pada tahun 2012, sekolah ini sudah mendeklarasikan diri sebagai pusat kegiatan kader Persyarikatan Muhammadiyah, artinya SDM yang berada di dalamnya harus benar-benar kader Muhammadiyah. Maka jika ada kader yang potensial sekolah ini pun ‘melamar’ dia untuk bergabung, meskipun yang bersangkutan belum S-1.

b. Kaderisasi dari lembaga pendidikan 1 naungan

Selain SD, Imam Syuhodo juga mempunyai PAUD yang sudah lebih dulu berdiri. Guru-guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo sebagiannya adalah guru-guru senior di PAUD Aisyiyah Imam Syuhodo yang dipindahtugaskan oleh manajemen ke SD

Muhammadiyah Imam Syuhodo. Karena tidak semua guru PAUD lulusan S-1, maka sebagian yang berpindah tugas ke SD pun juga masih ada yang bukan lulusan S-1.

c. Seleksi dengan membuka lowongan guru

Rekrutmen dan seleksi SDM dengan membuka lowongan pekerjaan ini juga lazim dilakukan oleh instansi-instansi yang membutuhkan SDM. Termasuk di dalamnya sekolah. Lowongan kerja yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Imam Syuhodo mensyaratkan beberapa kriteria, termasuk di dalamnya wajib memiliki ijazah S-1. Meskipun pada aplikasinya guru yang diterima juga tidak wajib S-1 PGSD/PGMI atau psikologi.

**Tahap 2: Menetapkan Kriteria Evaluasi**

Setelah masalah didefinisikan, maka analisis harus bisa mengetahui bagaimana dan kapan masalah tersebut sudah terselesaikan atau kebijakan yang diberikan sudah dapat diterima. Maka seorang analisis perlu untuk menetapkan kriteria evaluasi untuk mengevaluasi alternatif kebijakan yang ditawarkan maupun sebagai evaluasi yang digunakan saat memantau alternatif kebijakan yang dijalankan. Beberapa tindakan yang umum digunakan dalam menetapkan kriteria evaluasi meliputi: biaya, manfaat bersih, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kemudahan administrasi, legalitas, dan akseptabilitas politik.<sup>16</sup>

Analisis perlu membuat kriteria yang cukup spesifik sehingga pencapaiannya dapat diukur. Analisis juga harus menentukan kriteria yang relevan dengan kepentingan umum, untuk kelompok yang mungkin akan terlibat dalam masalah tersebut di masa depan. Jarang semua kriteria sama, jadi analisis harus menunjukkan kriteria yang paling relevan dengan pihak-pihak yang terlibat.

Terkait dengan masalah SDM di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, penulis melihat kembali ke dalam Indikator Mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat

---

<sup>16</sup> Ibid.

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2017) pada standar pendidikan dan tenaga kependidikan dalam indikator 1 tentang ketersediaan dan kompetensi guru. Sesuai ketentuan dalam indikator mutu tersebut disebutkan bahwa untuk SD harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.<sup>17</sup>

Selain guru kelas, SD juga membutuhkan guru mata pelajaran. Dan guru mata pelajaran pada SD hanya mencakup guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Artinya guru mata pelajaran yang dibutuhkan di SD adalah dari lulusan pendidikan agama dan PJOK. Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan/jurusan akan sulit memahami materi pembelajaran, layanan siswa belum terfasilitasi dengan baik dan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang tepat sasaran. Pemenuhan kualifikasi bagi guru ini menurut Muhammad Nasri Dini dapat dimaknai pula dengan penanaman nilai fathanah (salah satu sifat nabi, cerdas) dalam pendidikan.<sup>18</sup>

Dari sini dapat ditetapkan kriteria evaluasi untuk SDM di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, bahwa guru SD berdasarkan indikator mutu Kemendikbud adalah lulusan D-IV atau S-1 PGSD/PGMI atau psikologi, serta pendidikan agama, dan PJOK, artinya mau tidak mau guru SD termasuk SD Muhammadiyah Imam Syuhodo harus memenuhi kualifikasi tersebut.

### **Tahap 3: Mengidentifikasi Alternatif**

Pada tahap ini, sangat penting seorang analis dapat memahami tentang nilai, tujuan, dan sasaran dari semua pihak yang memungkinkan

---

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

<sup>18</sup> Muhammad Nasri Dini and Syamsul Bakri, "Implementasi Sifat Nabi Dalam Kepemimpinan Pendidikan Di Sekolah Dasar," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 5, no. 2 (2021): 248–259, <https://doi.org/10.20961/jdc.v5i2.55514>.

untuk terlibat dalam masalah. Analis yang sudah memiliki beberapa alternatif kebijakan pun juga tetap harus mencari referensi alternatif kebijakan lainnya, salah satunya bisa dengan meminta pendapat ahli atau analis yang sudah pernah menangani permasalahan yang sama mungkin di tempat yang berbeda. Hal ini dapat menambah wawasan terhadap masalah yang dihadapi, yang memungkinkan untuk membuat definisi ulang permasalahan dengan informasi yang baru, berikutnya dapat menentukan kriteria evaluasi yang sesuai pula. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelesaian prematur jika jumlah pilihan terbatas.<sup>19</sup>

Sederetan alternatif tersebut perlu diidentifikasi dengan baik, berikutnya juga dapat dilakukan kombinasi dari alternatif kebijakan yang telah ditemukan sebelumnya. Alternatif juga dapat diidentifikasi melalui penelitian analisis dan eksperimen, melalui teknik *brainstorming*, dan dengan menulis skenario. Semua alternatif yang tidak konvensional, yang tertolak di masa lalu dan alternatif apapun semua harus benar-benar dianalisis untuk dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan yang akan ditawarkan.

Terkait dengan permasalahan SDM yang terjadi di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, apa saja alternatif kebijakan yang dapat diambil? Jika masih terdapat banyak guru yang belum lulus S-1, lantas bagaimana dengan kapabilitas guru tersebut? Kepala sekolah SD Muhammadiyah Imam Syuhodo ternyata juga tidak tinggal diam. Sekolah juga secara rutin melakukan upgrading internal guru setiap pekan. Dalam kegiatan upgrading ini guru dan karyawan dibekali dengan ilmu-ilmu kependidikan baik teori maupun praktik. Guru juga diminta untuk melakukan *micro teaching* dengan objek rekan-rekan gurunya masing-masing. Di sini guru yang satu dengan yang lain dapat saling melengkapi jika ada kekurangan satu sama lainnya.

Selain itu, sekolah juga secara rutin menggelar *in house training* (IHT) setiap satu semester sekali. Kegiatan *in house training* ini biasanya

---

<sup>19</sup> Patton, Sawicki, and Clark, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*.

diadakan saat liburan semester, sepekan sebelum siswa masuk sekolah, guru-guru sudah diwajibkan untuk masuk dan mengikuti serangkaian IHT yang diselenggarakan sekolah. Kegiatan ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang pendidikan, baik oleh praktisi pendidikan di sekolah lain, dari pengurus persyarikatan Muhammadiyah, dari dinas pendidikan, maupun akademisi dari kampus-kampus. Selain *in house training* internal, sekolah juga rutin mengirimkan guru-gurunya dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Menurut kepala sekolah, kegiatan IHT maupun workshop ini bertujuan untuk mereshuffle wawasan keilmuan para guru dan karyawan, juga untuk mendapatkan wawasan maupun motivasi baru dari para ahli di bidang pendidikan.<sup>20</sup>

Selain IHT dan workshop, sekolah juga melakukan pembiasaan literasi/membaca kepada para guru. Karena buku adalah jendela ilmu, perpustakaan sekolah menyediakan buku yang tidak hanya bisa dibaca oleh para siswa saja, tetapi juga buku-buku yang bisa dibaca oleh para guru dan menambah wawasan keilmuan mereka. Apakah hal-hal di atas cukup? Secara kapabilitas mungkin para guru sudah bisa terbantu, karena guru dapat lebih memahami substansi kurikulum dan pembelajaran. Dan guru sebagai pendamping siswa memang harus memahami dengan baik substansi dari kurikulum tersebut.<sup>21</sup> Tapi secara administratif tetap belum bisa diterima, artinya guru-guru yang bukan lulusan S-1 tetap akan menemui kendala administratif. Mereka termasuk juga akan kesulitan jika akan menempuh pendidikan profesi guru untuk menjadi guru profesional atau guru sertifikasi. Maka selain IHT, kepala sekolah juga terus mendorong para guru agar menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1).

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Grand Design Kegiatan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo* (Sukoharjo: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, 2018).

<sup>21</sup> Jarwandi and Hedy Ramadhan Putra Pembangunan, "Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anti Korupsi Pada Pembelajaran Kimia," *AoEJ: Academy of Education Journal* 13, no. 1 (2022): 113–126.

Dari 12 lulusan SMA sederajat dan 1 lulusan D1 ini masih ada 5 yang saat ini sedang menempuh kuliah S-1. Tabel di bawah ini menjelaskannya:

**Tabel 3. Guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo yang Sedang Kuliah S-1**

Guru	Jumlah	% jumlah guru
Sedang kuliah S-1	5	38.46
Tidak/belum kuliah S-1	8	61.54
	13	

Dari tabel di atas diketahui bahwa masih ada 5 guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo lulusan SMA sederajat yang saat ini sedang menempuh pendidikan S-1. Sedangkan 8 sisanya hingga saat ini tidak atau belum menempuh kuliah S-1. Selain lulusan SMA, ada beberapa guru lulusan S-1 non PGSD yang sekarang sedang menempuh pendidikan PGSD.

#### **Tahap 4: Mengevaluasi Kebijakan Alternatif**

Pada tahap ini kebijakan alternatif yang telah didaftar sebelumnya dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi kebijakan alternatif ini harus mengacu pada prospek implementasi, apakah kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang baik saat diimplementasikan. Hal ini dapat dinilai dengan kriteria evaluasi, terutama kriteria utamanya. Namun ada kemungkinan pula untuk menambah aspek-aspek baru pada masalah sehingga menambah atau mengubah kriteria, tentu akan berpengaruh dalam evaluasi kebijakan alternatif ini.<sup>22</sup>

Dari tahap yang sudah dilalui sebelumnya diketahui bahwa masih banyak guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo yang belum/tidak menempuh pendidikan S-1 sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.

<sup>22</sup> Patton, Sawicki, and Clark, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*.

Artinya kepala sekolah perlu menerapkan kebijakan lain, tidak hanya mendorong saja para guru untuk menempuh pendidikan S-1.

#### **Tahap 5: Menampilkan Alternatif dan Membedakan di Antara Alternatif Tersebut**

Penyajian perbandingan alternatif bisa dengan berbagai cara, namun dengan cara matriks akan memudahkan untuk memberikan sarana visual cepat untuk menyoroti pro dan kontra atau kerugian dan keuntungan kebijakan alternatif yang ditawarkan. Dalam hal ini kreativitas dan ketepatan dalam penyajian format menjadi penting agar penyajian analisis tidak membosankan namun dapat mendorong klien untuk bergerak menyelesaikan permasalahan.<sup>23</sup>

Ada beberapa alternatif kebijakan lain yang bisa diterapkan oleh kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan SDM yang ada di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memperketat syarat administasi rekrutmen

Jika persyaratan administrasi guru SD adalah minimal mempunyai ijazah S-1 jurusan PGSD/PGMI, psikologi, pendidikan agama dan PJOK, maka sekolah tidak boleh melonggarkan syarat administrasi tersebut saat proses rekrutmen guru. Artinya harus ada seleksi berkas administrasi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, misalnya tahap ujian dan wawancara. Di sini panitia rekrutmen harus tegas mendiskualifikasikan para pelamar yang ijasahnya tidak sesuai dengan persyaratan agar tidak lagi terjadi lulusan yang tidak sesuai kualifikasi masuk pada tahap seleksi selanjutnya.

b. Mewajibkan guru untuk kuliah S-1

Kalau poin sebelumnya ditetapkan bagi para pelamar sebelum diterima sebagai guru, maka poin ini berlaku bagi yang sudah berstatus sebagai guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Jika dalam kebijakan yang sudah dijalankan oleh kepala sekolah hanya ada dorongan dan motivasi untuk guru yang belum sesuai kualifikasinya agar menempuh

---

<sup>23</sup> Ibid.

pendidikan S-1. Maka salah satu kebijakan alternatif yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah adalah dengan mewajibkan guru yang bersangkutan untuk menempuh pendidikan S-1.

Jika guru tersebut merasa tidak mampu secara finansial, maka sekolah juga bisa menggulirkan kebijakan lanjutan terkait hal tersebut. Di antaranya memberikan beasiswa kepada guru yang bersangkutan dengan perjanjian yang ketat. Karena guru yang bersangkutan pada kenyataannya memang juga dibutuhkan oleh sekolah. Jika tidak bisa memberikan beasiswa penuh, maka sekolah juga bisa memberikan beasiswa sebagian. Atau memberikan pinjaman untuk biaya pendidikan yang akan dipotong setiap bulan dari gaji yang diterima oleh guru.

Selain berlaku untuk guru yang sudah mengajar di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, hal ini juga bisa diberlakukan untuk kader persyarikatan yang sebelumnya mengajar di PAUD Aisyiyah Imam Syuhodo dan dipindahtugaskan ke SD Muhammadiyah Imam Syuhodo.

#### **Tahap 6: Memantau Kebijakan yang Diterapkan**

Analisis perlu memantau hasil alternatif kebijakan yang dijalankan oleh klien, untuk dapat memperhatikan apakah alternatif kebijakan sudah dilakukan sesuai rancangan atau belum, sehingga jika terjadi suatu kegagalan maka analisis pun dapat kembali mengevaluasi hasil kerjanya pun juga dapat memperbaiki implementasi alternatif kebijakan jika memang ada kesalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh klien secara sengaja maupun tidak.<sup>24</sup>

Dengan adanya pemantauan dari analisis, maka pengetahuan, pemeliharaan kebijakan, pemantauan, dan prosedur evaluasi dapat dirancang untuk mencegah beberapa kegagalan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Muhammad Munadi, secara etis, pembuat kebijakan yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada mereka mengenai kebijakan bidang pendidikan yang barangkali mempunyai

---

<sup>24</sup> Ibid.



pengaruh yang besar pada mereka akan dapat mengurangi gangguan yang tidak perlu pada proses perencanaan, juga memberikan keuntungan bagi pembuat kebijakan karena adanya dukungan untuk menghasilkan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, publik akan punya paling tidak berpartisipasi melalui penyampaian atas pandangan mereka. Sehingga terjadi komunikasi aktif antara pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai obyek pelaksanaan kebijakan.<sup>25</sup>

Kebijakan mana pun yang ke depan akan dijalankan oleh kepala SD Muhammadiyah Imam Syuhodo berkaitan dengan permasalahan SDM, perlu untuk dipantau dan dievaluasi pula dalam penerapannya. Jika permasalahan terkait dengan kualifikasi ijasah S-1 sudah selesai pun, nantinya pasti akan muncul permasalahan baru. Di antaranya adalah tuntutan agar semua guru mempunyai sertifikat pendidik. Tapi hal ini akan lebih mudah untuk dihadapi jika masalah kualifikasi S-1 untuk guru sudah terselesaikan.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa SD Muhammadiyah Imam Syuhodo mempunyai permasalahan SDM, yaitu banyak di antara gurunya yang belum lulusan S-1. Guru yang sudah lulusan S-1 pun masih banyak yang belum sesuai kualifikasi, yaitu S-1 PGSD/PGMI, psikologi, pendidikan agama dan PJOK. Maka kepala SD Muhammadiyah Imam Syuhodo perlu menerapkan alternatif kebijakan agar semua guru di sekolahnya memenuhi kualifikasi S-1.

---

<sup>25</sup> Muhammad Munadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 12, no. 2 (2008): 268–284.

Hal ini dapat dilakukan sejak proses rekrutmen, maupun setelah menjadi guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo.

Penelitian ini hanya difokuskan pada kualifikasi pendidikan terakhir guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo saja. Peneliti lain dapat melengkapinya dengan meneliti tentang kualifikasi kepala sekolah atau tenaga kependidikan yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, Walid Fajar. “Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sekolah Dasar Islam.” *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 10, no. 1 (2020): 47–55.
- Atmodiwiro, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Ardadizya Jaya, 2000.
- Bakri, Muhammad Nasri Dini and Syamsul. “Implementasi Sifat Nabi Dalam

- Kepemimpinan Pendidikan Di Sekolah Dasar.” *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 5, no. 2 (2021): 248–259.  
<https://doi.org/10.20961/jdc.v5i2.55514>.
- CNN. “Kemenag: 52 Ribu Guru Madrasah Belum Lulus S1.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917200847-20-695992/kemenag-52-ribu-guru-madrasah-belum-lulus-s1>.
- Dunn, William N. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua).” Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2003.
- Entrisnasari, Fantika Vera, Fantika Febry Puspitasari, and Supriyanto Supriyanto. “Implementasi Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Al-Qur’an.” *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no. 2 (2020): 210–225.
- H.A.R, Tilaar, and Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008.
- Kintamani, Ida, and Dewi Hermawan. “Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 404–418.
- Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan. *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Miles, Mathew B and Huberman A Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Jakarta. UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munadi, Muhammad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta.” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 12, no. 2 (2008): 268–284.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Undang-Undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Patton, Carl V., David S. Sawicki, and Jennifer J. Clark. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Basic Methods of Policy Analysis and Planning*.

- London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2015.
- Pembangunan, Jarwandi and Hedy Ramadhan Putra. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anti Korupsi Pada Pembelajaran Kimia." *AoEJ: Academy of Education Journal* 13, no. 1 (2022): 113–126.
- Penyusun, Tim. *Grand Design Kegiatan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo*. Sukoharjo: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, 2018.
- Republika. "Banyak Guru Honorer K2 Belum S1 Ini Langkah Pemerintah." [https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qzryda485/Banyak-Guru-Honorer-K2-Belum-S1-Ini-Langkah-Pemerintah](https://www.republika.co.id/berita/qzryda485/banyak-guru-honorer-k2-belum-s1-ini-langkah-pemerintah).
- Rosyidi, Muh. Hasyim. "Analisis Kebijakan Pendidikan Perspektif Islam Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 1–11.
- Saidy, Muhammad. "Utilizing of Islamic Educational Technology Strategy in Fullfilment Standards of Islamic Education." *EDUCAN: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 190–200.
- Siregar, Lina Mayasari. "Upaya Pendidikan Islam Pada Masa Awal Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 1 (2017): 104–114.
- Siyoto, Dr. Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta. Literasi Media Publishing, 2015.
- SS Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya. Apollo, 1997.
- Suhelayanti. "Analisis Kebijakan Pendidikan." *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2019): 11–26.
- Widarsono, Agus. *Human Resources Scorecard: Linking People, Strategy And Performance (Suatu Model Pengukuran Kinerja SDM)*. Bandung. Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI BHMN), 2009.
- Daftar Guru Dan Karyawan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Tahun 2020/2021*. Sukoharjo: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, 2020.